

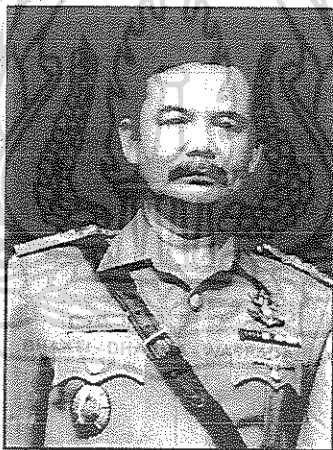
**"STRATEGI PEMBERDAYAAN PERAN POLRI SEBAGAI  
UJUNG TOMBAK PENANGANAN MASALAH KAMDAGRI  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN STABILITAS  
KAMTIBMAS MENUJU PARADIGMA BARU"**

KEYNOTE SPEECH  
PADA SEMINAR SEKOLAH BAGI PASIS SESPIM POLRI  
DIKREG KE-34 / WIRA WIDYA DHARMA  
PADA TANGGAL 29 MARET 1999  
DI LEMBANG BANDUNG  
OLEH :  
MAYOR JENDERAL POLISI Drs. BIBIT S. RIAN TO MM

Assalamu'alaikum  
Wr. Wb.

S u a t u  
kehormatan bagi kami  
untuk bertindak  
sebagai keynote  
speaker dalam  
kegiatan seminar  
sekolah bagi pasis  
sespim Polri, pada  
hari ini Senin tanggal  
29 Maret 1999, dengan  
judul "Strategi  
pemberdayaan peran  
Polri sebagai ujung tombak  
penanganan masalah Kamdagri dalam  
rangka mewujudkan Stabilitas  
Kamtibmas menuju paradigma baru".

Dari judul di atas, dapat kita  
temukan beberapa kalimat kunci  
sebagai berikut :



1. S t r a t e g i  
pemberdayaan  
peran Polri.
2. Ujung tombak  
penanganan  
m a s a l a h  
Kamdagri.
3. Mewujudkan  
s t a b i l i t a s  
Kamtibmas.
4. M e n u j u  
paradigma baru.

**MENUJU PARADIGMA  
BARU.**

Istilah "Paradigma Baru" ini  
muncul akhir-akhir ini yang  
bersumber dari ABRI dalam Buku  
"ABRI dan Reformasi" dimaksudkan  
untuk menanggapi perkembangan

situasi, Pasca 21 Mei 1998, yang merupakan titik awal peralihan dari Orde Baru kepada Orde Reformasi. Dalam menyikapi perubahan tersebut, ABRI telah merumuskan 4 (empat) paradigma baru, yaitu :

1. Merubah posisi dan metode tidak harus selalu di depan (institusi fungsional).
2. Merubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi (lingkup diperkecil) tidak intervensi (pemukiran kontributif).
3. Merubah cara-cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung.
4. Kesiapan melakukan political and role sharing (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya.

Di bidang politik, nampaknya reformasi menghendaki "dikurangnya" bahkan ada yang mengusulkan "dihapuskannya" peran ABRI di bidang sosial politik. Di lingkungan ABRI sendiri didapat indikasi adanya kesadaran bahwa reaksi ini timbul karena adanya kesalahan dalam pelaksanaan **Kekaryaan ABRI**, yang merupakan sebagian kecil dari sejumlah peran sopsol ABRI. Hasil Sidang Istimewa MPR 1999 telah disepakati

pengurangan sopsol ABRI secara bertahap, dimulai dengan pengurangan **Jatah** jumlah anggota ABRI di DPR RI menjadi 38 orang saja.

Di bidang Hukum, nampaknya reformasi menghendaki tegaknya hukum, dalam arti hukum Tidak dijadikan Alat Politik, tetapi hukum harus Dijadikan alat Kontrol politik. Hukum harus mandiri, tidak terpengaruh oleh "kekuatan" lain, hukum harus dijadikan panglima, dengan istilah lain ditegakkannya **Supremasi Hukum**.

Akibat dari dorongan ini, muncul tuntutan masyarakat akan kemandirian lembaga-lembaga hukum, lembaga peradilan, lembaga kejaksaan agung dan pisahnya Polri dari ABRI.

Wajah hukum saat ini dapat dikatakan "Babak Belur", ada issue Mafia Pengadilan, Pungli, hilang kambing lapor polisi menjadi hilang sapi, yang kesemuanya dirangkum dengan istilah KKN. Hukum bisa disegani dan dipatuhi apabila **Penegakan Hukum** harus bersih, tidak pandang bulu, lugas, konsisten dan konsekuen dan memperhatikan HAM. Dari sisi lain muncul tuntutan bahwa dengan lepasnya Polri dari ABRI, maka istilah ABRIpun harus direvisi menjadi APRI, yang dilandasi bahwa

1. Merubah sikap ingin dilayani menjadi sikap melayani.
2. Lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara banyak.
3. Lebih berorientasi ke masyarakat daripada kepada diri sendiri.
4. Service Excellent Action (pelayanan total yang diwujudkan dalam setiap tindak kepolisian).

untuk menegakkan keamanan dalam negeri, harus dilakukan melalui penegakan hukum. Terlepasnya Polri dari ABRI, menuntut dipisahkannya Urusan Pertahanan yang diawaki oleh APRI dengan tugas penegakkan kedaulatan atas ancaman dari pihak asing (luar negeri) melalui operasi pertahanan, dengan Urusan Keamanan dalam negeri yang diawaki oleh Polri melalui penegakkan hukum dengan operasi kepolisian. Di negara manapun urusan Kamdagri dipisahkan dari urusan pertahanan. Belanda yang ingin kembali menguasai Hindia Belanda melalui operasi/aksi kepolisian bukan operasi militer.

## PERWUJUDAN STABILITAS KAMTIBMAS

Istilah Stabilitas, akhir-akhir ini

berkembang ke arah konotasi negatif, karena alasan stabilitas dibenarkan melanggar hukum. Akibat yang terjadi setelah reformasi adalah berupa kegiatan yang kontra stabilitas yang dirasakan adil oleh sekelompok tertentu, yang pada kenyataannya melanggar hukum juga, bahkan telah menimbulkan keresahan pada masyarakat lain. Stabilitas Kamtibmas Macam apa yang harus diwujudkan ? Masyarakat menghendaki stabilitas Kamtibmas yang berdasarkan kekuasaan (politik, ekonomi dan lain-lain). Apabila hukum dapat ditegakkan secara benar dan konsisten, tidak pandang bulu, maka rasa aman masyarakat akan terwujud, Baik dalam pengertian Peace (kedamaian), Secure (keamanan), Safety (keselamatan) dan Surety (kepastian hukum). Upaya perwujudan stabilitas Kamtibmas disamping berdasarkan Hukum, juga dilakukan bersama (Community Policing), dan mencerminkan perwujudan HAM.

## PARADIGMA BARU POLRI

Untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat tersebut, Polri perlu mengoreksi paradigmanya melalui kegiatan-kegiatan :

1. Merubah sikap ingin dilayani menjadi sikap melayani.

2. Lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara banyak.
3. Lebih berorientasi ke masyarakat daripada kepada diri sendiri.
4. Service Excellent Action (pelayanan total yang diwujudkan dalam setiap tindak kepolisian).

## POLRI SEBAGAI UJUNG TOMBAK KAMDAGRI

Ujung tombak berarti berada di depan di antara kekuatan-kekuatan lain dalam pelaksanaan tugas Kamdagri.

Pada akhir-akhir ini kebijakan mengedepankan Polri sudah mengumandang di bumi nusantara ini. Namun pelaksanaannya tidak selancar yang diharapkan, namun patut disyukuri bahwa perhatian ke arah pembangunan Polri sudah mulai mengemuka.

Sebagai ujung tombak seyogyanya Polri sudah diasah, sehingga setiap saat selalu siap digunakan untuk menombak sasaran. Masalahnya apa yang harus diasah? Tentunya terkait dengan Profesionalisme Polri dalam

pelaksanaan tugas. Profesi terkait dengan ilmu, teknologi dan etika profesi yang dilandasi pedoman hidup dan pedoman karyanya. Perkembangan profesi terkait dengan sistem pendidikan yang tentunya bergeser dari Sisdik ABRI kepada Sisdik Polri yang dikembangkan berdasarkan Sisdiknas.

Apabila Polri diibaratkan sebagai ujung dan suatu tombak, tentunya kita

**Sebagai ujung tombak seyogyanya Polri sudah diasah, sehingga setiap saat selalu siap digunakan untuk menombak sasaran. Masalahnya apa yang harus diasah?**

harus tahu apasaja yang membangun batang tombaknya. Dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang nomor 20/82, yang

secara bulat-bulat dimaasukkan dalam Undang-Undang nomor 28/97 ..... bersama dengan kekuatan Hankamneg lainnya.... Batangnya ternyata Hankamneg, disitu ada ABRI (didalamnya ada Polri), Ratih (Tibum, Linra, Kamra, Wanra), khusus (linmas) dan Sarprasnas.

Reformasi nampaknya menghendaki kohesi badan tombak ini dirubah, bagaimana merubahnya? Untuk ini perlu dipecahkan dulu masalah Kamdagri itu apa? Apabila disepakati bahwa Kamdagri dipelihara dan ditegakkan melalui hukum, maka

batang tombak tersebut berupa :

1. **Pengemban fungsi kepolisian**, yang terdiri dari Polri, alat kepolisian khusus, siskamswakarsa (peran serta masyarakat). Yang terakhir ini perlu dibedakan antara yang bertujuan mengamankan diri dan lingkungannya (Satpam) dengan kelompok orang-orang yang Mau membantu polisi dalam melaksanakan tugasnya, seperti Pak Ogah, PKS, BKLL, Pramuka Bhayangkara dan lain-lain.
2. **Criminal Justice System**, yang terdiri dari Polri, PPNS, Jaksa, Hakim, Pengacara, Panitera, Lembaga Pemasayarakatan.

**Apa Peran ujung tombak ?**  
antarat aini :

- Membimbing, mengarahkan, menuntun setelah mendengarkan, menggali aspirasi masyarakat dalam menangani permasalahannya sendiri dan lingkungannya.
- Memberikan bantuan kekuatan terhadap posisi-posisi lemah dari pengemban fungsi kepolisian dan kerjasama dalam menangani permasalahan bersama.
- Mendinamisir pelaksanaan tugas pengemban fungsi kepolisian.

**Masalah Kamdagri itu apa ?**

Masalah Kamdagri dalam kacamata Polri adalah setiap permasalahan di segenap aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang dapat berupa penyimpangan sosial, kriminalitas (pelanggaran dan pidana), sampai kerusuhan massal (penyimpangan tertib sosial, kerusuhan sosial, huru-hara sampai pada pemberontakan) yang kesemuanya merupakan bentuk-bentuk pelanggaran norma-norma sosial dan norma-norma hukum.

Secara umum Polri mengelompokkan masalah Kamdagri kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

**Ancaman Faktur (AF)**, disebut juga peristiwa, kejadian, kasus yang terjadi sehari-hari, baik berupa kriminalitas, bencana dan kecelakaan.

**Police Hazard (PH)**, adalah kondisi dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan kehadiran petugas, seperti potensi konflik diantara dua kelompok, lokasi-lokasi berkumpulnya massa, kegiatan masyarakat dan lain-lain.

**Faktor Korelatif Kriminogen (FKK)**, adalah faktor-faktor yang mengendap dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Ipoleksosbud Hankam) yang merupakan sumber timbulnya

masalah. Berbagai kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini bersumber pada FKK ini.

## **STRATEGI PEMBERDAYAAN PERAN POLRI**

Peran Polri sesuai tugas pokoknya dapat dikelompokkan dalam :

1. Peran sebagai penegak hukum.
2. Peran sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
3. Peran sebagai pembimbing masyarakat.

**Strategi pemberdayaan yang disarankan adalah :**

1. Perwujudan pelayanan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas Polri di lapangan, baik operasional maupun pembinaan, melalui perubahan sikap dari dilayani menjadi sikap melayani.
2. Penegakan Hukum, harus bebas dari keterpengaruhan politik dan interest kelompok atau pribadi, namun harus didasarkan pada rasa keadilan masyarakat dan tidak bertentangan dengan HAM.
3. Community Policing, merupakan wahana perwujudan Kamtibmas yang stabil, yang melibatkan

segenap komponen kekuatan Kamtibmas.

4. Penggalian nilai-nilai positif dari kebijakan-kebijakan Kapolri mulai dari membenahan Polri sampai dengan 6 Pro 3 K, seperti :

- Pola aksi deteksi.
- Bentuk operasi Polri.
- Manajemen operasi Polri.
- Infra struktur penanggulangan Kamtibmas (IPK).
- Jati diri.
- Pelayanan Polri.
- 3 PIL
- Tekadku pengabdian terbaik
- Dan sebagainya.

5. Peningkatan kesejahteraan prajurit yang terkait dengan sistem sosial dalam kaitannya pengembangan organisasi.

Lembang, 29 Maret 1999

**PENULIS**

**KOORDINATOR STAF AHLI KAPOLRI**

**Drs. BIBIT S. RIAN TO, MM**

Mayor Jenderal Polisi